

## Perhutani Raih Sertifikat CoC

JAKARTA--Perum Perhutani akhirnya mendapatkan sertifikat lacak balak atau dikenal *Chain of Custody* (CoC), ISO 9001. Perhutani juga sertifikasi verifikasi legalitas asal usul kayu (Verification of Legal Origin/VLO) setelah melalui proses selama 6 tahun.

Plt Dirut Perum Perhutani, Upik Rosalina Wasrin, di Jakarta, Rabu, mengatakan, perolehan sertifikasi ini merupakan bukti kepedulian perusahaan terhadap pengelolaan hutan secara lestari.

Sertifikat CoC dan sistem manajemen mutu ISO 9001 diperoleh Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Industri Kayu Cepu Jawa Tengah sementara sertifikat VLO yang distandarisasi oleh Smartwood diberikan kepada Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Randublatung, Jawa Timur.

Dia mengatakan Perhutani menargetkan seluruh KPH yang berjumlah 57 mendapatkan CoC yang mengacu skema FSC. "Sebelum 2015, seluruh KPH diharapkan bisa dapat sertifikasi," kata Upik.

GM KBM Industri Kayu Cepu, Adi Pradana, mengakui sertifikat yang diperoleh industrinya memberikan peluang besar bagi produk kayu Perhutani, seperti *flooring* dan *garden furniture*, untuk di ekspor dengan volume yang lebih besar.

"Kita harapkan akan ada peningkatan pangsa pasar sampai 25 persen dan harga juga bisa naik minimal 5-15 persen dari harga pasar. Misalnya, harga *flooring* 3.000 dolar AS per meter kubik akan naik 15 persen kemudian *garden furniture* yang harganya mulai 50 dolar AS per potong juga akan naik 5 persen," tegas Adi.

Selain peningkatan pangsa pasar, menurut dia, akan ada juga peningkatan pembeli sampai 30 persen. "Kalau selama ini kita fokuskan ke Italia, Jerman, Spanyol, Korea, dan Jepang, maka dengan perolehan sertifikat ini diharapkan pembeli dari negara Eropa lainnya berminat," katanya.

Namun, kata dia, setiap produk berlabel CoC ini akan dikenai biaya 2,5 persen dari total produk yang dijual, yang merupakan ketentuan Tropical Forest Trust (TFT) yang setiap anggotanya menerapkan sertifikasi pada setiap produknya.

Masalahnya, menurut Koordinator Kehutanan/Operasi SmartWood untuk Asia Pasifik, Christian Sloth, sertifikat yang harus dimiliki untuk bisa memperlancar penetrasi pasar ini tidak menjamin bisa meningkatkan harga produk yang diekspor.

Keharusan memiliki berbagai sertifikat yang disyaratkan untuk memasuki pasar negara maju, menurut dia, lebih karena permintaan dari perusahaan importer dan konsumen.

Apalagi, kata Christian, sertifikasi lebih bersifat sukarela dan bukannya paksaan dari negara konsumen. "Sertifikasi bukanlah produk dari keputusan politik, tetapi merupakan ketentuan yang dirumuskan oleh swasta." zak